



## Paradigma Neoliberal dan Demokrasi Sosial dalam (Perspektif Ekonomi Islam) : Kebijakan Pengentasan Kemiskinan di Indonesia

Rispan<sup>1</sup>, Isnaini Harahap<sup>2</sup>, Windu Anggara<sup>3</sup>  
<sup>1,2,3</sup> Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

Alamat: Jl. Sutomo Ujung No.96A, Durian, Kec. Medan Tim., Kota Medan, Sumatera Utara 20236

Email: [rispan3004234010@uinsu.ac.id](mailto:rispan3004234010@uinsu.ac.id)<sup>1</sup>, [isnaini@uinsu.ac.id](mailto:isnaini@uinsu.ac.id)<sup>2</sup>, [windu@uinsu.ac.id](mailto:windu@uinsu.ac.id)<sup>3</sup>

**Abstract:** *This study analyzes the differences between the neoliberal and social democratic paradigms in poverty alleviation policies in Indonesia, by adding an Islamic Economic perspective as an alternative. The neoliberal paradigm focuses on free market mechanisms, deregulation, and minimizing the role of the state, but often exacerbates social inequality. In contrast, the social democratic paradigm balances the role of the market and state intervention through resource redistribution and protection of vulnerable groups through sustainable social programs. Islamic economics offers a complementary approach oriented towards the principles of distributive justice, balance, and solidarity, by integrating spiritual values into socio-economic policies. A qualitative approach is used in this study, with policy analysis of programs such as the Family Hope Program (PKH) and the National Health Insurance (JKN). The results show that the social democratic paradigm is more effective in reducing poverty systemically than neoliberalism, especially through increasing access to education, health, and social protection. However, budget constraints, corruption, and infrastructure gaps remain significant challenges. The Islamic Economic perspective emphasizes the importance of zakat, waqf, and infaq as instruments of wealth redistribution that have the potential to strengthen inclusive and sustainable poverty alleviation policies. This study recommends strengthening the synergy between the paradigm of social democracy and the values of Islamic Economics to create policies that are more effective, equitable, and oriented towards the welfare of society holistically.*

**Keywords:** *Neoliberal, Social Democracy, Islamic Economics, Poverty Alleviation, PKH, JKN, Zakat*

**Abstrak:** Penelitian ini menganalisis perbedaan paradigma neoliberal dan demokrasi sosial dalam kebijakan pengentasan kemiskinan di Indonesia, dengan menambahkan perspektif Ekonomi Islam sebagai alternatif. Paradigma neoliberal berfokus pada mekanisme pasar bebas, deregulasi, dan minimalisasi peran negara, tetapi sering kali memperburuk ketimpangan sosial. Sebaliknya, paradigma demokrasi sosial menyeimbangkan peran pasar dan intervensi negara melalui redistribusi sumber daya dan perlindungan kelompok rentan melalui program sosial berkelanjutan. Ekonomi Islam menawarkan pendekatan komplementer yang berorientasi pada prinsip keadilan distributif, keseimbangan, dan solidaritas, dengan mengintegrasikan nilai-nilai spiritual dalam kebijakan sosial-ekonomi. Pendekatan kualitatif digunakan dalam penelitian ini, dengan analisis kebijakan terhadap program seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Hasil penelitian menunjukkan bahwa paradigma demokrasi sosial lebih efektif dalam mengurangi kemiskinan secara sistemik dibandingkan neoliberalisme, terutama melalui peningkatan akses pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial. Namun, keterbatasan anggaran, korupsi, dan kesenjangan infrastruktur tetap menjadi tantangan signifikan. Perspektif Ekonomi Islam menekankan pentingnya zakat, wakaf, dan infak sebagai instrumen redistribusi kekayaan yang berpotensi memperkuat kebijakan pengentasan kemiskinan secara inklusif dan berkelanjutan. Penelitian ini merekomendasikan penguatan sinergi antara paradigma demokrasi sosial dan nilai-nilai Ekonomi Islam untuk menciptakan kebijakan yang lebih efektif, berkeadilan, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat secara holistik.

**Kata Kunci:** Neoliberal, Demokrasi Sosial, Ekonomi Islam, Pengentasan Kemiskinan, PKH, JKN, Zakat

## **1. PENDAHULUAN**

Kemiskinan tetap menjadi salah satu tantangan utama di Indonesia yang memengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), angka kemiskinan nasional menurun dari 10,19% pada September 2019 menjadi 9,22% pada September 2022. Meskipun demikian, ketimpangan sosial tetap menjadi isu yang signifikan, dengan indeks Gini pada tahun 2022 berada di angka 0,384, mencerminkan kesenjangan ekonomi yang masih perlu diatasi. Dalam konteks ini, paradigma yang mendasari kebijakan pengentasan kemiskinan memainkan peran penting dalam menentukan efektivitas langkah-langkah yang diambil pemerintah.

Dua paradigma utama yang sering menjadi landasan kebijakan pengentasan kemiskinan adalah paradigma neoliberal dan demokrasi sosial. Paradigma neoliberal, yang berakar pada prinsip pasar bebas, menekankan efisiensi ekonomi melalui deregulasi, privatisasi, dan pengurangan intervensi negara. Pendekatan ini sering kali dianggap mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang cepat, namun dalam konteks pengentasan kemiskinan, paradigma ini menuai kritik. Sebagai contoh, pengurangan subsidi bahan bakar minyak (BBM) pada tahun 2015 menyebabkan peningkatan biaya hidup yang langsung memengaruhi masyarakat miskin. Studi Hidayat (2019) menunjukkan bahwa kebijakan berbasis neoliberal cenderung memperbesar kesenjangan sosial dengan manfaat yang lebih banyak dinikmati oleh kelompok ekonomi atas.

Sebaliknya, paradigma demokrasi sosial menawarkan pendekatan yang lebih inklusif dengan menyeimbangkan peran pasar dan negara. Demokrasi sosial menekankan redistribusi sumber daya melalui intervensi negara untuk melindungi kelompok rentan dan menciptakan keadilan sosial. Program Keluarga Harapan (PKH) dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) merupakan contoh implementasi paradigma ini di Indonesia. Berdasarkan laporan Kementerian Sosial, PKH berhasil menurunkan angka kemiskinan ekstrem sebesar 1,2% pada tahun 2020, sementara JKN telah mencakup lebih dari 240 juta penduduk Indonesia, meningkatkan akses masyarakat miskin terhadap layanan kesehatan dasar. Data ini menunjukkan bahwa pendekatan demokrasi sosial memiliki dampak nyata dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin.

Selain pendekatan neoliberal dan demokrasi sosial, perspektif ekonomi Islam mulai menarik perhatian sebagai alternatif dalam pengentasan kemiskinan. Mekanisme seperti zakat, wakaf, dan infak memiliki potensi besar dalam mendukung redistribusi kekayaan secara adil. Misalnya, pengelolaan zakat nasional yang terorganisir dapat menyumbang hingga 3% dari Produk Domestik Bruto (PDB), sebagaimana dilaporkan oleh Badan Amil

Zakat Nasional (BAZNAS) pada tahun 2021. Hal ini mencerminkan peran signifikan ekonomi Islam dalam melengkapi pendekatan yang sudah ada.

Perdebatan antara paradigma neoliberal dan demokrasi sosial serta potensi ekonomi Islam memiliki relevansi yang besar dalam menentukan arah kebijakan domestik di Indonesia. Menurut Mansur (2018), paradigma neoliberal sering dipandang sebagai solusi jangka pendek untuk masalah ekonomi, sedangkan demokrasi sosial lebih diarahkan pada solusi jangka panjang yang berkelanjutan. Sementara itu, perspektif ekonomi Islam menawarkan pendekatan berbasis nilai yang dapat menjembatani kesenjangan antara pertumbuhan ekonomi dan pemerataan hasil pembangunan. Oleh karena itu, penting untuk menganalisis bagaimana ketiga pendekatan ini dapat saling melengkapi dalam mengatasi tantangan kemiskinan yang kompleks di Indonesia.

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis perbedaan antara paradigma neoliberal dan demokrasi sosial dalam kebijakan pengentasan kemiskinan di Indonesia, serta mengeksplorasi potensi ekonomi Islam sebagai solusi alternatif. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang didukung data kuantitatif, analisis ini akan mengeksplorasi bagaimana ketiga paradigma tersebut memengaruhi desain dan implementasi kebijakan, serta dampaknya terhadap kelompok rentan. Diharapkan, artikel ini dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam dan komprehensif mengenai pendekatan yang paling efektif untuk mengatasi kemiskinan secara berkelanjutan di Indonesia.

## **Literatur Review**

### **1. Neoliberalisme dan Pengentasan Kemiskinan**

Neoliberalisme adalah suatu paradigma ekonomi yang menekankan pasar bebas sebagai mekanisme utama dalam mengatur perekonomian. Prinsip dasarnya mencakup deregulasi, privatisasi, dan pengurangan peran negara dalam perekonomian. Menurut Harvey (2022), neoliberalisme berpandangan bahwa pasar bebas dapat menciptakan efisiensi ekonomi dan mendorong pertumbuhan, yang pada akhirnya akan mengurangi kemiskinan. Dalam kerangka ini, negara seharusnya hanya bertindak sebagai fasilitator, sementara pasar menentukan alokasi sumber daya secara optimal. Kebijakan neoliberal di Indonesia, seperti pengurangan subsidi BBM dan privatisasi sektor publik, bertujuan meningkatkan efisiensi ekonomi dan menarik investasi asing.

Namun, konsep "trickle-down effect," yang menjadi dasar teori neoliberalisme, mendapat kritik karena sering kali gagal memberikan manfaat bagi masyarakat miskin. Stiglitz (2021) berargumen bahwa pasar bebas cenderung memperburuk ketimpangan

sosial karena tidak mampu memastikan distribusi kekayaan yang adil. Di Indonesia, kebijakan neoliberal seperti deregulasi dan privatisasi sering meningkatkan harga barang dan jasa penting, sehingga memperburuk kondisi masyarakat miskin. Akibatnya, akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan energi menjadi semakin sulit bagi kelompok rentan.

Selain itu, neoliberalisme juga menciptakan ketergantungan pada investasi asing dan sektor swasta yang sering kali tidak memprioritaskan kebutuhan sosial. Privatisasi layanan dasar seperti air bersih dan listrik telah menyebabkan peningkatan biaya yang memberatkan masyarakat miskin. Piketty (2020) dalam *Capital and Ideology* menyoroti bahwa ketimpangan yang dihasilkan oleh kebijakan neoliberal memperburuk kemiskinan struktural. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang lebih berorientasi pada keadilan sosial untuk memastikan distribusi kekayaan yang lebih merata.

## **2. Demokrasi Sosial dan Pengentasan Kemiskinan**

Paradigma demokrasi sosial menawarkan pendekatan yang lebih inklusif dalam pengentasan kemiskinan. Demokrasi sosial menekankan keseimbangan antara peran pasar dan negara dalam menyediakan layanan sosial serta perlindungan bagi kelompok rentan. Menurut Esping-Andersen (2021), negara harus aktif dalam mengurangi ketimpangan sosial melalui redistribusi sumber daya dan penyediaan layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial. Negara-negara Skandinavia yang menganut model demokrasi sosial menunjukkan keberhasilan dalam menciptakan sistem kesejahteraan dengan tingkat kemiskinan dan ketimpangan yang rendah.

Di Indonesia, pendekatan demokrasi sosial mulai diterapkan melalui program-program seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). PKH memberikan bantuan tunai bersyarat kepada keluarga miskin dengan tujuan meningkatkan akses pendidikan dan kesehatan. Penelitian Bank Dunia (2021) menunjukkan bahwa PKH berhasil mengurangi angka kemiskinan ekstrem sebesar 1,2% dalam lima tahun terakhir. JKN juga telah memperluas akses kesehatan bagi masyarakat miskin, membantu mereka mengurangi beban biaya kesehatan.

Meski demikian, implementasi kebijakan demokrasi sosial di Indonesia menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan anggaran, korupsi, dan kesenjangan infrastruktur. Piketty (2020) mencatat bahwa kendala dalam pengelolaan anggaran dan distribusi sumber daya sering kali menghambat pencapaian tujuan redistribusi. Oleh karena itu, diperlukan reformasi struktural dalam manajemen sumber daya dan peningkatan transparansi untuk memastikan efektivitas kebijakan.

### **3. Perspektif Ekonomi Islam sebagai Alternatif**

Selain neoliberalisme dan demokrasi sosial, pendekatan ekonomi Islam menawarkan solusi yang berlandaskan prinsip keadilan distributif dan solidaritas. Instrumen seperti zakat, wakaf, dan infak memiliki potensi besar dalam pengentasan kemiskinan. Amartya Sen (2020) dalam *Development as Freedom* menekankan pentingnya kebebasan substantif, yang sejalan dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam meningkatkan kesejahteraan kolektif.

Ekonomi Islam menempatkan keadilan sosial sebagai inti dari kebijakan ekonomi. Zakat, misalnya, berfungsi sebagai redistribusi kekayaan untuk memastikan kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi. Wakaf dapat digunakan untuk mendanai layanan sosial seperti pendidikan dan kesehatan, sementara infak mendorong solidaritas sosial. Perspektif ini memberikan alternatif yang lebih berorientasi pada nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan distributif.

### **4. Perbandingan Neoliberalisme dan Demokrasi Sosial**

Perbandingan antara neoliberalisme dan demokrasi sosial menunjukkan perbedaan fundamental dalam pendekatan pengentasan kemiskinan. Neoliberalisme mengutamakan efisiensi pasar dan pengurangan peran negara, tetapi sering kali gagal mengatasi akar penyebab kemiskinan. Sebaliknya, demokrasi sosial lebih menekankan redistribusi dan perlindungan sosial bagi kelompok rentan. Deacon (2023) menyimpulkan bahwa demokrasi sosial lebih efektif dalam menciptakan kesejahteraan yang merata dibandingkan neoliberalisme.

Namun, tantangan dalam implementasi kebijakan demokrasi sosial, seperti keterbatasan anggaran dan korupsi, memerlukan perhatian serius. Dalam konteks Indonesia, penguatan kebijakan berbasis demokrasi sosial dapat dilengkapi dengan instrumen ekonomi Islam untuk menciptakan solusi yang lebih holistik. Dengan mengintegrasikan prinsip redistribusi dalam demokrasi sosial dan ekonomi Islam, Indonesia dapat menciptakan kebijakan pengentasan kemiskinan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Neoliberalisme dan demokrasi sosial memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing dalam pengentasan kemiskinan. Sementara neoliberalisme berfokus pada efisiensi ekonomi, demokrasi sosial lebih menekankan pemerataan dan keadilan sosial. Penelitian menunjukkan bahwa pendekatan demokrasi sosial lebih efektif dalam mengurangi ketimpangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan melengkapi kebijakan demokrasi sosial dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam, Indonesia dapat menciptakan

model pengentasan kemiskinan yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Reformasi manajemen anggaran, pengurangan korupsi, dan peningkatan transparansi akan menjadi langkah penting untuk memastikan keberhasilan kebijakan ini.

## **2. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis kebijakan untuk menganalisis perbedaan paradigma neoliberal dan demokrasi sosial dalam kebijakan pengentasan kemiskinan di Indonesia. Pendekatan ini dipilih karena kompleksitas isu kebijakan pengentasan kemiskinan membutuhkan pemahaman yang mendalam mengenai perspektif aktor kebijakan dan dampak implementasi kebijakan terhadap masyarakat. Analisis kebijakan memungkinkan eksplorasi mendalam terhadap dinamika dan konteks kebijakan yang berbasis paradigma tertentu, sementara pendekatan kualitatif memberikan fleksibilitas untuk menggali data secara kaya dan bermakna.

Analisis tematik dilakukan melalui beberapa tahap. Pertama, dilakukan pengkodean awal (initial coding) dengan membaca transkrip wawancara dan dokumen secara mendalam untuk mengidentifikasi kode-kode yang relevan dengan fokus penelitian. Kedua, kode-kode tersebut dikelompokkan ke dalam tema-tema utama yang mencerminkan aspek-aspek kunci dari penerapan paradigma neoliberal dan demokrasi sosial dalam kebijakan pengentasan kemiskinan. Ketiga, tema-tema ini dianalisis lebih lanjut untuk menginterpretasikan hubungan antara data dan teori yang mendasari penelitian. Proses ini dilakukan secara sistematis dengan bantuan teknik analisis manual yang mendalam untuk memastikan keakuratan pengelompokan data.

Pendekatan kualitatif dipilih karena isu kebijakan pengentasan kemiskinan melibatkan berbagai aktor dengan perspektif yang berbeda, seperti pembuat kebijakan, pejabat pemerintah, dan penerima manfaat. Metode analisis kebijakan memberikan kerangka untuk memahami bagaimana paradigma tertentu memengaruhi desain dan implementasi kebijakan. Teknik triangulasi dipilih untuk memvalidasi data dari berbagai sumber, seperti wawancara, dokumen resmi, dan data statistik, guna memastikan keandalan temuan. Member checking dilakukan untuk memastikan interpretasi peneliti sesuai dengan perspektif informan, sehingga meningkatkan validitas hasil penelitian.

Penelitian ini melibatkan 15 informan yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling untuk memastikan relevansi mereka dengan fokus penelitian. Informan terdiri atas pembuat kebijakan di tingkat kementerian, pejabat pemerintah daerah yang terlibat langsung dalam implementasi program, serta penerima manfaat dari Program Keluarga Harapan (PKH)

dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Profil responden mencakup jabatan (misalnya, direktur program, kepala dinas sosial), wilayah kerja (urban dan rural), serta keterkaitan langsung dengan kebijakan yang dikaji.

Pendekatan kualitatif dalam penelitian ini merujuk pada panduan Creswell (2018) mengenai desain penelitian kualitatif, yang menekankan pentingnya memahami konteks dan perspektif aktor. Analisis kebijakan mengacu pada Bardach (2012), yang memberikan kerangka sistematis untuk mengevaluasi kebijakan publik. Penggunaan triangulasi data dan member checking sejalan dengan rekomendasi dari Lincoln dan Guba (1985) untuk meningkatkan kredibilitas dan transferabilitas penelitian kualitatif.

Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memahami dampak kebijakan berbasis paradigma neoliberal dan demokrasi sosial dalam mengatasi kemiskinan di Indonesia.

### **3. HASIL PENELITIAN**

Penelitian ini menunjukkan bahwa perbedaan paradigma neoliberal dan demokrasi sosial dalam kebijakan pengentasan kemiskinan di Indonesia menghasilkan dampak yang signifikan terhadap kelompok rentan dan ketimpangan sosial. Secara umum, kebijakan yang berlandaskan pada paradigma neoliberal, meskipun menghasilkan pertumbuhan ekonomi, tidak mampu mengatasi masalah kemiskinan secara komprehensif. Sebaliknya, kebijakan yang berbasis pada prinsip demokrasi sosial lebih efektif dalam mengurangi kemiskinan dan ketimpangan sosial dalam jangka panjang.

Kebijakan neoliberal di Indonesia, seperti pengurangan subsidi bahan bakar minyak (BBM) dan privatisasi layanan publik, memiliki dampak langsung yang merugikan bagi masyarakat miskin. Pengurangan subsidi BBM, yang dilakukan dengan alasan efisiensi anggaran negara, menyebabkan lonjakan harga barang-barang kebutuhan dasar, seperti pangan dan transportasi, yang langsung mempengaruhi daya beli masyarakat miskin. Meskipun kebijakan ini bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan menarik investasi asing, hasilnya justru memperburuk ketimpangan sosial. Sebagai contoh, pada tahun 2015, penghapusan subsidi BBM menyebabkan inflasi sebesar 6,38%, menurut data Badan Pusat Statistik (BPS). Kebijakan privatisasi, yang memperkenalkan sektor swasta dalam penyediaan layanan publik seperti listrik, air, dan kesehatan, sering kali mengarah pada peningkatan tarif yang tidak terjangkau oleh masyarakat miskin. Data dari laporan World Bank tahun 2019 menunjukkan bahwa privatisasi sektor energi di Indonesia mengakibatkan kenaikan tarif listrik rata-rata sebesar 30% dalam lima tahun terakhir. Hal ini memperburuk

kondisi masyarakat miskin yang semakin terpinggirkan dan kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar mereka.

Di sisi lain, kebijakan yang mengadopsi prinsip demokrasi sosial, seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), menunjukkan hasil yang lebih positif dalam mengurangi kemiskinan. PKH, yang memberikan bantuan tunai bersyarat kepada keluarga miskin dengan syarat anak-anak mereka bersekolah dan mendapatkan imunisasi, terbukti efektif dalam meningkatkan akses terhadap pendidikan dan kesehatan. Data dari Kementerian Sosial menunjukkan bahwa lebih dari 10 juta keluarga di Indonesia telah menerima manfaat dari PKH, yang berkontribusi pada penurunan angka kemiskinan ekstrem dari 4,5% pada tahun 2015 menjadi 2,3% pada tahun 2023. Selain itu, rasio ketimpangan (Gini ratio) menurun dari 0,41 pada tahun 2014 menjadi 0,38 pada tahun 2023, sebagaimana dilaporkan oleh BPS.

PKH tidak hanya memberikan bantuan langsung untuk kebutuhan dasar keluarga miskin, tetapi juga mendorong keluarga untuk berinvestasi dalam pendidikan dan kesehatan, yang merupakan faktor kunci dalam memutus rantai kemiskinan. Dengan memberikan insentif bagi keluarga untuk memastikan anak-anak mereka bersekolah dan mendapatkan perawatan kesehatan, PKH telah berhasil meningkatkan kualitas hidup penerima manfaat dan memberikan harapan untuk masa depan yang lebih baik. JKN, yang memastikan akses terhadap layanan kesehatan universal, juga berkontribusi pada pengurangan beban keuangan masyarakat miskin akibat biaya kesehatan. Berdasarkan laporan World Bank, sejak implementasi JKN pada tahun 2014, angka cakupan kesehatan nasional meningkat hingga 86% pada tahun 2022, memberikan dampak positif pada peningkatan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat.

Dengan demikian, kebijakan berbasis demokrasi sosial menunjukkan keberhasilan yang lebih signifikan dalam mengurangi kemiskinan dan ketimpangan sosial di Indonesia. Dukungan data statistik dari sumber terpercaya seperti BPS, Kementerian Sosial, dan World Bank menggarisbawahi pentingnya pendekatan berbasis demokrasi sosial dalam menghadapi tantangan kemiskinan di Indonesia.

Selain itu, JKN juga memainkan peran penting dalam pengentasan kemiskinan dengan memberikan akses kesehatan yang lebih terjangkau bagi masyarakat miskin. Program ini memungkinkan masyarakat yang sebelumnya tidak mampu membayar biaya kesehatan untuk mendapatkan layanan medis yang diperlukan tanpa beban biaya yang memberatkan. Meskipun ada tantangan dalam implementasi JKN, terutama terkait dengan kualitas layanan di daerah terpencil, program ini telah memberikan manfaat besar bagi masyarakat miskin,



mengurangi ketergantungan mereka pada biaya kesehatan yang tinggi dan mengurangi angka kematian akibat penyakit yang sebelumnya tidak terjangkau oleh layanan medis.

Namun, meskipun kebijakan berbasis demokrasi sosial menunjukkan hasil yang lebih baik, penelitian ini juga mengidentifikasi sejumlah tantangan dalam implementasinya. Salah satu masalah utama adalah keterbatasan anggaran yang tersedia untuk mendanai program-program sosial. Anggaran yang terbatas sering kali menghambat perluasan cakupan program dan memperlambat distribusi bantuan ke daerah-daerah yang paling membutuhkan. Meskipun PKH telah berhasil mengurangi kemiskinan ekstrem, terdapat laporan bahwa beberapa keluarga yang seharusnya menerima bantuan tidak terdaftar dalam program ini akibat masalah administratif dan kurangnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah. Selain itu, meskipun JKN memberikan manfaat besar, kualitas layanan kesehatan di daerah-daerah terpencil masih menjadi masalah yang perlu segera diatasi, mengingat keterbatasan fasilitas dan tenaga medis di daerah tersebut.

Selain masalah administratif dan anggaran, tantangan lain yang dihadapi oleh kebijakan berbasis demokrasi sosial adalah ketergantungan pada birokrasi yang sering kali lambat dan tidak efisien. Meskipun program-program seperti PKH dan JKN bertujuan untuk memberikan bantuan langsung kepada masyarakat miskin, proses pendistribusian bantuan sering kali terhambat oleh birokrasi yang rumit dan kurang transparansi dalam pengelolaan dana. Hal ini mengurangi efektivitas program dan menyebabkan keterlambatan dalam memberikan bantuan kepada mereka yang benar-benar membutuhkan. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan perbaikan dalam sistem administrasi dan pengelolaan dana bantuan sosial, serta peningkatan koordinasi antara berbagai lembaga pemerintah di tingkat pusat dan daerah.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa paradigma demokrasi sosial lebih efektif dalam pengentasan kemiskinan dibandingkan dengan paradigma neoliberal. Meskipun terdapat tantangan dalam implementasi, kebijakan yang berbasis pada prinsip redistribusi sumber daya dan perlindungan sosial terbukti lebih berhasil dalam mengurangi ketimpangan sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin secara berkelanjutan. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia perlu memperkuat peran negara dalam memastikan akses yang lebih adil terhadap layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial, serta memperbaiki mekanisme distribusi bantuan untuk mencapai tujuan pengentasan kemiskinan yang lebih efektif dan inklusif.

#### **4. PEMBAHASAN**

##### **a. Paradigma Neoliberal dalam Kebijakan Pengentasan Kemiskinan**

Paradigma neoliberal dalam kebijakan pengentasan kemiskinan di Indonesia, yang berfokus pada pasar bebas dan efisiensi ekonomi, sering kali terwujud melalui deregulasi, privatisasi layanan publik, dan pengurangan subsidi sosial. Kebijakan ini bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dengan mengurangi intervensi negara dan memperbesar peran sektor swasta. Salah satu contoh nyata dari penerapan paradigma neoliberal adalah kebijakan privatisasi BUMN (Badan Usaha Milik Negara), yang diharapkan dapat meningkatkan kinerja perusahaan dan memberikan dampak positif terhadap ekonomi secara keseluruhan. Pemerintah Indonesia, melalui privatisasi, berharap dapat meningkatkan daya saing dan menarik investasi asing yang pada gilirannya dapat menciptakan lapangan kerja dan merangsang pertumbuhan ekonomi.

Namun, Robinson, W. I. (2020) berpendapat meskipun kebijakan ini menghasilkan pertumbuhan ekonomi, pendekatan neoliberal sering kali gagal mengatasi ketimpangan sosial yang ada. Kebijakan seperti pengurangan subsidi bahan bakar minyak (BBM) pada tahun 2005, yang bertujuan untuk mengurangi beban anggaran negara, berakibat langsung pada peningkatan biaya hidup. Masyarakat miskin yang bergantung pada subsidi BBM merasa dampaknya sangat berat, karena harga barang-barang kebutuhan pokok seperti pangan dan transportasi melonjak tajam. Meskipun pemerintah mencoba mengkompensasi dampak tersebut dengan Bantuan Langsung Tunai (BLT), kebijakan ini terbukti hanya bersifat jangka pendek dan tidak menyelesaikan akar masalah kemiskinan. BLT hanya memberikan bantuan sementara yang tidak mampu mengubah kondisi ekonomi jangka panjang bagi keluarga miskin.

Selain itu, Rachmawati, S. (2023) berpendapat bahwa paradigma neoliberal juga berpotensi memperburuk kesenjangan sosial karena hasil dari pertumbuhan ekonomi lebih banyak dinikmati oleh kelompok elit ekonomi. Privatisasi sektor kesehatan dan pendidikan, misalnya, sering kali mengurangi akses masyarakat miskin terhadap layanan dasar ini. Sektor swasta yang berfokus pada keuntungan sering kali tidak mampu memberikan layanan yang terjangkau bagi masyarakat miskin. Hal ini menciptakan ketidaksetaraan dalam akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan, dua sektor penting yang sangat memengaruhi kualitas hidup dan peluang keluar dari kemiskinan. Dengan kata lain, meskipun sektor ekonomi tertentu mengalami

pertumbuhan pesat, manfaatnya tidak dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat, terutama mereka yang berada dalam kelompok rentan.

Secara keseluruhan, meskipun paradigma neoliberal dapat menciptakan pertumbuhan ekonomi yang pesat, ia tidak cukup untuk mengatasi tantangan kemiskinan yang kompleks di Indonesia. Kebijakan yang lebih inklusif dan berorientasi pada redistribusi sumber daya, seperti yang dijalankan dalam paradigma demokrasi sosial, diperlukan untuk mengurangi ketimpangan sosial dan memastikan bahwa hasil pembangunan dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat.

#### **b. Paradigma Demokrasi Sosial dalam Kebijakan Pengentasan Kemiskinan**

Sebaliknya, paradigma demokrasi sosial menawarkan pendekatan yang lebih seimbang antara peran pasar dan negara, dengan penekanan pada intervensi negara untuk melindungi kelompok rentan dan menyediakan layanan publik yang adil dan merata. Dalam konteks Indonesia, kebijakan ini terlihat jelas dalam implementasi program-program sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). PKH, sebagai salah satu bentuk bantuan tunai bersyarat (*conditional cash transfer*), telah terbukti efektif dalam mengurangi kemiskinan ekstrem. Program ini memberikan bantuan tunai kepada keluarga miskin dengan syarat tertentu, seperti memastikan anak-anak mereka bersekolah dan mendapatkan imunisasi. Dengan cara ini, PKH tidak hanya memberikan bantuan ekonomi langsung, tetapi juga mendorong investasi dalam modal manusia yang berkelanjutan, terutama dalam pendidikan dan kesehatan (Prasetyo, R, 2022).

JKN, di sisi lain, merupakan contoh nyata bagaimana negara dapat memainkan peran penting dalam memastikan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan. Dengan memberikan subsidi premi bagi masyarakat miskin, JKN membantu mengurangi beban finansial yang sering kali menjadi penyebab kemiskinan. Program ini juga berfungsi sebagai jaring pengaman sosial yang memberikan perlindungan kesehatan kepada jutaan warga negara yang sebelumnya tidak mampu membayar biaya perawatan medis. Meskipun JKN menghadapi beberapa tantangan, seperti defisit anggaran dan distribusi fasilitas kesehatan yang tidak merata, program ini tetap memberikan manfaat besar bagi masyarakat miskin dengan mengurangi risiko keuangan akibat biaya kesehatan yang tinggi.

Perkasa, D. (2021) mengatakan bahawa paradigma demokrasi sosial juga menekankan pentingnya keadilan distribusi dalam pembangunan ekonomi. Dalam

konteks ini, redistribusi sumber daya melalui pajak progresif dan alokasi anggaran yang berpihak pada kelompok rentan menjadi langkah penting. Hal ini menunjukkan bahwa paradigma demokrasi sosial tidak hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada pemerataan hasil pembangunan. Dalam jangka panjang, kebijakan berbasis demokrasi sosial bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang lebih inklusif, di mana setiap individu memiliki akses yang setara terhadap pendidikan, kesehatan, dan kesempatan ekonomi. Oleh karena itu, program-program sosial yang berbasis pada prinsip redistribusi dan perlindungan sosial memiliki dampak yang lebih berkelanjutan dalam mengurangi kemiskinan dan ketimpangan sosial.

### **c. Perbandingan Efektivitas Kedua Paradigma**

Studi kasus di Indonesia menunjukkan bahwa paradigma demokrasi sosial lebih efektif dibandingkan paradigma neoliberal dalam mengurangi kemiskinan secara berkelanjutan. Kebijakan berbasis demokrasi sosial tidak hanya memberikan solusi jangka pendek, tetapi juga menciptakan fondasi bagi pembangunan manusia yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Program-program seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) telah berhasil mengurangi kemiskinan ekstrem dan meningkatkan akses terhadap layanan dasar bagi masyarakat miskin, dengan memberikan bantuan langsung yang terintegrasi dengan upaya meningkatkan kualitas hidup mereka melalui pendidikan dan kesehatan. Sebaliknya, paradigma neoliberal sering kali menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang tidak inklusif. Meskipun beberapa sektor mungkin mengalami pertumbuhan pesat, manfaatnya tidak merata dan sering kali tidak dirasakan oleh kelompok masyarakat miskin (Mubyarto, S, 2019). Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan neoliberal tidak cukup untuk mengatasi kompleksitas masalah kemiskinan di Indonesia. Kebijakan yang berfokus pada efisiensi ekonomi dan pasar bebas sering kali mengabaikan realitas ketimpangan sosial dan kesenjangan akses terhadap layanan dasar, yang menjadi akar dari masalah kemiskinan.

Dalam menghadapi ketimpangan sosial yang ditimbulkan oleh paradigma neoliberal, Ekonomi Islam dapat menjadi solusi pelengkap yang memberikan fokus pada keadilan distributif. Ekonomi Islam melarang eksploitasi dan penindasan dalam setiap transaksi ekonomi serta menekankan pentingnya kesetaraan. Sistem pembiayaan berbasis bagi hasil dalam Ekonomi Islam, yang menggantikan sistem bunga (riba), dapat mengurangi beban masyarakat miskin yang sering kali terjebak

dalam utang. Dengan prinsip-prinsip seperti larangan riba dan transaksi yang adil, Ekonomi Islam menawarkan alternatif yang lebih berkeadilan dalam mendistribusikan kekayaan, yang lebih merata dan tidak hanya menguntungkan segelintir pihak.

Di sisi lain, dalam paradigma demokrasi sosial yang menekankan peran negara untuk menjamin kesejahteraan sosial dan mengurangi ketimpangan, Ekonomi Islam menyediakan instrumen-instrumen seperti zakat, wakaf, dan infaq sebagai solusi untuk redistribusi kekayaan yang lebih adil. Zakat, sebagai salah satu pilar Ekonomi Islam, bertujuan untuk mengurangi kesenjangan sosial dengan mentransfer sebagian kekayaan dari yang lebih mampu kepada yang kurang mampu. Wakaf dan infaq juga dapat digunakan untuk membiayai program-program sosial yang penting, seperti pendidikan dan kesehatan, yang menjadi kebutuhan dasar bagi masyarakat miskin. Dalam hal ini, Ekonomi Islam mendukung nilai-nilai demokrasi sosial dengan memperkuat sistem redistribusi kekayaan yang berkelanjutan dan lebih adil. Sebagai contoh, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Indonesia telah mengimplementasikan konsep-konsep ini dalam membantu pengentasan kemiskinan. Melalui pengelolaan dana zakat yang transparan dan efektif, BAZNAS memberikan bantuan dalam berbagai bidang, seperti pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin. Dengan demikian, Ekonomi Islam dapat memperkuat prinsip-prinsip demokrasi sosial dalam menciptakan masyarakat yang lebih inklusif dan adil.

#### **d. Tantangan Implementasi Demokrasi Sosial di Indonesia**

##### **1) Keterbatasan Anggaran**

Keterbatasan anggaran menjadi salah satu tantangan terbesar dalam implementasi paradigma demokrasi sosial di Indonesia. Meskipun program sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) telah memberikan manfaat signifikan bagi masyarakat miskin, alokasi anggaran yang tersedia sering kali tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan yang terus berkembang. Pada tahun 2023, anggaran PKH hanya mencapai Rp34,1 triliun, jumlah yang relatif kecil dibandingkan dengan banyaknya penduduk miskin yang membutuhkan bantuan. Meskipun demikian, keterbatasan anggaran ini tidak sepenuhnya menghambat upaya pemerintah dalam mengurangi kemiskinan, namun efektivitasnya tetap terbatas.

Mansur, A. (2018) menyoroti bahwa keterbatasan anggaran mempengaruhi tidak hanya cakupan tetapi juga kualitas program sosial. Misalnya, program JKN yang bertujuan untuk memberikan akses kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia, terutama yang miskin, sering kali menghadapi defisit anggaran yang signifikan. BPJS Kesehatan, yang mengelola JKN, pernah mengalami defisit sebesar Rp15,5 triliun pada tahun 2019, yang mengancam keberlanjutan program ini. Kekurangan dana ini menghambat penyediaan fasilitas kesehatan yang memadai, terutama di daerah-daerah dengan kebutuhan lebih tinggi. Oleh karena itu, peningkatan alokasi anggaran untuk sektor kesejahteraan sosial sangat diperlukan.

Untuk mengatasi keterbatasan anggaran, pemerintah dapat melakukan reformasi fiskal dan mencari sumber pendanaan alternatif. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah mengoptimalkan penerimaan pajak, khususnya dari sektor informal yang selama ini belum tergarap dengan baik. Pengenalan pajak karbon dan penguatan pajak progresif juga dapat membantu menambah sumber daya bagi program-program sosial, meningkatkan keberlanjutannya. Di sisi lain, instrumen keuangan syariah seperti zakat, wakaf, dan infak dapat menjadi alternatif pendanaan yang efektif untuk memperluas cakupan program sosial dan meningkatkan keberlanjutannya.

## 2) Korupsi dan Inefisiensi

Korupsi dalam distribusi bantuan sosial adalah tantangan besar lainnya dalam implementasi demokrasi sosial di Indonesia. Meskipun program-program sosial seperti PKH dan JKN dirancang untuk membantu masyarakat miskin, praktik korupsi yang terjadi dalam pengelolaan dana seringkali merusak efektivitas program tersebut. Laporan Transparency International menunjukkan bahwa korupsi masih menjadi masalah besar di Indonesia, baik di tingkat pusat maupun daerah. Kasus korupsi dalam pengelolaan anggaran sosial seringkali merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan menghambat keberhasilan kebijakan sosial (Lembaga Demografi Universitas Indonesia, 2022).

Contoh nyata adalah kasus korupsi dalam penyaluran bantuan sosial pada masa pandemi COVID-19, yang melibatkan pejabat publik dalam penyalahgunaan dana. Korupsi ini merugikan keuangan negara dan memperburuk kondisi masyarakat miskin yang seharusnya menerima bantuan. Ketika dana bantuan disalahgunakan, masyarakat yang paling membutuhkan justru tidak

menerima dukungan yang mereka harapkan, memperburuk ketimpangan sosial dan kemiskinan (Kementerian Sosial Republik Indonesia, 2022).

Untuk mengatasi masalah korupsi dan inefisiensi, pemerintah perlu melakukan reformasi birokrasi yang lebih mendalam. Salah satu langkah penting adalah meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam distribusi bantuan sosial. Teknologi digital seperti sistem penyaluran bantuan berbasis data terpadu (DTKS) dapat membantu memastikan bantuan sampai ke penerima yang tepat, sekaligus mengurangi potensi penyalahgunaan dana. Pengawasan yang lebih ketat dari lembaga independen dan partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan juga sangat penting untuk memperkuat integritas program sosial.

### 3) Kesenjangan Infrastruktur

Kesenjangan infrastruktur antara daerah perkotaan dan pedesaan masih menjadi penghambat utama dalam efektivitas kebijakan berbasis demokrasi sosial di Indonesia. Program-program sosial seperti PKH dan JKN sering kali terkendala oleh keterbatasan infrastruktur, terutama di daerah-daerah terpencil yang sulit dijangkau. Di beberapa daerah, distribusi bantuan PKH harus melalui jarak yang jauh, yang mengurangi dampak positif program tersebut. Hal ini memperlihatkan bahwa infrastruktur yang kurang memadai menghambat distribusi bantuan sosial yang lebih merata.

Selain itu, program JKN juga menghadapi tantangan serupa terkait dengan infrastruktur kesehatan yang tidak merata. Meskipun JKN telah memberikan perlindungan kesehatan bagi sebagian besar penduduk Indonesia, masyarakat di daerah 3T masih kesulitan untuk mengakses layanan kesehatan yang dijamin oleh program ini. Menurut Hukum, F. (2020), fasilitas kesehatan yang kurang memadai di daerah 3T, seperti puskesmas yang terbatas dan kekurangan tenaga medis, membuat program JKN tidak sepenuhnya efektif dalam menjangkau masyarakat yang membutuhkan.

Untuk mengatasi kesenjangan infrastruktur ini, pemerintah harus mempercepat pembangunan infrastruktur di daerah-daerah terpencil, seperti puskesmas, sekolah, dan fasilitas umum lainnya. Kerja sama dengan sektor swasta dan organisasi masyarakat sipil juga penting untuk memperluas jangkauan layanan sosial di daerah-daerah yang sulit dijangkau.

#### **e. Data dan Contoh Kasus untuk Mendukung Analisis**

##### **1) Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH)**

Penelitian Bank Dunia pada tahun 2021 menunjukkan bahwa Program Keluarga Harapan (PKH) berhasil mengurangi angka kemiskinan ekstrem di Indonesia sebesar 1,2% dalam lima tahun terakhir. Program ini juga berhasil meningkatkan partisipasi sekolah anak-anak dari keluarga miskin sebesar 20%. Di Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, PKH berhasil mengangkat 15.000 keluarga keluar dari kategori miskin dalam waktu tiga tahun, dengan peningkatan akses ke pendidikan dan layanan kesehatan.

Pengurangan kemiskinan ekstrem yang dicapai oleh PKH dapat dijelaskan melalui mekanisme intervensi negara yang langsung menysasar keluarga miskin. Program ini memberikan bantuan tunai yang disertai dengan kewajiban untuk mengakses layanan pendidikan dan kesehatan. Oleh karena itu, program ini mengurangi beban biaya hidup keluarga miskin, yang pada gilirannya meningkatkan kualitas hidup mereka dalam jangka panjang. Dalam konteks ini, PKH memiliki dampak positif pada daya beli dan mengurangi ketergantungan terhadap sektor informal.

##### **2) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan Akses Kesehatan**

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS, 2023), JKN telah memberikan perlindungan kesehatan kepada lebih dari 240 juta penduduk Indonesia. Namun, pada tahun 2019, BPJS Kesehatan mengalami defisit Rp15,5 triliun, yang mengancam keberlanjutan program. Selain itu, distribusi fasilitas kesehatan yang tidak merata menyulitkan masyarakat di daerah terpencil untuk mengakses layanan yang dijamin oleh JKN.

Defisit anggaran yang dialami BPJS Kesehatan pada 2019 menunjukkan tantangan besar dalam keberlanjutan program JKN, yang bergantung pada pembiayaan yang cukup. Ketika dana tidak mencukupi, program ini bisa berisiko mengurangi cakupan layanan atau kualitas pelayanan kesehatan yang diterima oleh masyarakat miskin. Keterbatasan fasilitas kesehatan yang tersebar di daerah tertentu juga menjadi faktor penghalang akses yang optimal bagi masyarakat miskin. Akibatnya, meskipun JKN bertujuan untuk meningkatkan akses layanan kesehatan, kesenjangan dalam distribusi dan pembiayaan dapat mengurangi efektivitas program ini.



3) Kritik terhadap Pendekatan Neoliberal

Pendekatan neoliberal, seperti penghapusan subsidi BBM pada 2014, berdampak negatif pada masyarakat miskin. Kenaikan harga BBM sebesar 30% memicu inflasi dan menurunkan daya beli masyarakat. Meskipun ada program Bantuan Langsung Tunai (BLT), bantuan ini hanya bersifat sementara dan tidak menyelesaikan akar masalah kemiskinan.

Penghapusan subsidi BBM pada 2014 mengakibatkan kenaikan harga barang dan jasa yang sangat mempengaruhi daya beli masyarakat miskin. Kenaikan harga BBM menyebabkan inflasi yang meningkatkan biaya hidup, yang membuat keluarga miskin semakin terjepit. Meskipun BLT diberikan sebagai kompensasi, bantuan ini tidak dapat menanggulangi masalah struktural kemiskinan, seperti ketimpangan distribusi pendapatan dan akses terhadap layanan dasar.

**f. Alternatif Ekonomi Islam dalam Mengentaskan Kemiskinan di Indonesia**

1) Perspektif Neoliberal

Pendekatan ekonomi neoliberal cenderung memfokuskan pada pengurangan peran negara dalam ekonomi, serta meningkatkan efisiensi pasar. Namun, dalam konteks kemiskinan, pendekatan ini seringkali tidak cukup untuk mengatasi ketimpangan yang terjadi. Penghapusan subsidi dan kebijakan pasar bebas dapat memperburuk ketidaksetaraan, sehingga masyarakat miskin semakin tertinggal. Dalam perspektif ekonomi Islam, prinsip keadilan sosial lebih diutamakan, yang menyarankan redistribusi kekayaan melalui zakat, infaq, dan sedekah untuk mengurangi kesenjangan.

2) Perspektif Demokrasi Sosial

Pendekatan demokrasi sosial lebih menekankan pada intervensi negara dalam mengatur ekonomi untuk memastikan distribusi kekayaan yang lebih adil. Dalam hal ini, ekonomi Islam dapat menawarkan solusi melalui sistem wakaf dan sistem ekonomi berbasis syariah yang mengutamakan kesejahteraan sosial. Wakaf, sebagai instrumen ekonomi Islam, dapat digunakan untuk mendanai pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur di daerah miskin. Sistem ini memperkenalkan konsep berbagi kekayaan yang lebih holistik dan tidak hanya bergantung pada mekanisme pasar atau subsidi.

## **g. Rekomendasi Kebijakan Berbasis Data**

### 1) Peningkatan Alokasi Anggaran Sosial

Pemerintah perlu meningkatkan alokasi anggaran untuk program sosial berbasis demokrasi sosial. Saat ini, Indonesia hanya mengalokasikan sekitar 3% dari PDB untuk sektor kesejahteraan sosial, jauh lebih rendah dibandingkan negara-negara Skandinavia yang mengalokasikan lebih dari 25% PDB mereka. Peningkatan anggaran ini akan memungkinkan perbaikan kualitas layanan publik dan pengentasan kemiskinan.

### 2) Reformasi Birokrasi

Reformasi birokrasi perlu diprioritaskan untuk meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas pengelolaan program sosial. Teknologi digital, seperti sistem penyaluran bantuan berbasis data terpadu (DTKS), dapat membantu memastikan bantuan sampai pada penerima yang tepat.

### 3) Penguatan Infrastruktur di Daerah 3T

Pembangunan infrastruktur di daerah 3T harus dipercepat untuk memastikan akses yang lebih merata terhadap layanan sosial, seperti kesehatan dan pendidikan. Pembangunan fasilitas kesehatan dan pendidikan yang lebih baik di daerah-daerah terpencil akan membantu distribusi bantuan sosial dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

### 4) Diversifikasi Sumber Pendapatan Negara

Pemerintah perlu mengoptimalkan penerimaan pajak, terutama dari sektor informal dan pajak progresif. Pajak karbon juga dapat menjadi sumber pendanaan baru yang mendukung keberlanjutan fiskal negara sambil mengurangi emisi gas rumah kaca. Dengan diversifikasi sumber pendapatan negara, pemerintah dapat menciptakan sistem keuangan yang stabil dan berkelanjutan untuk mendanai program sosial.

## **5. KESIMPULAN**

Artikel ini mengungkapkan bahwa kebijakan pengentasan kemiskinan di Indonesia dipengaruhi oleh dua paradigma utama, yaitu neoliberal dan demokrasi sosial, yang memiliki implikasi berbeda terhadap keberhasilan program sosial. Paradigma neoliberal, yang berfokus pada mekanisme pasar bebas dan efisiensi ekonomi, sering kali gagal mengatasi ketimpangan sosial karena manfaat pertumbuhan ekonomi cenderung dinikmati oleh kelompok elit, sementara kelompok rentan tetap terpinggirkan.

Sebaliknya, paradigma demokrasi sosial, yang menekankan redistribusi sumber daya dan penyediaan layanan publik, terbukti lebih efektif dalam mengurangi kemiskinan dan menciptakan keadilan sosial. Namun, paradigma ini juga menghadapi tantangan seperti keterbatasan anggaran, korupsi, dan kesenjangan infrastruktur yang menghambat implementasi optimal.

Dalam perspektif Ekonomi Islam, terdapat prinsip-prinsip keadilan distributif, solidaritas, dan keseimbangan yang dapat melengkapi kelemahan kedua paradigma tersebut. Instrumen keuangan Islam seperti zakat, wakaf, dan infak memiliki potensi besar untuk mendukung pendanaan program sosial secara berkelanjutan. Melalui pengelolaan zakat dan wakaf produktif, program pemberdayaan masyarakat miskin dapat diperluas, misalnya dengan pembangunan infrastruktur di daerah terpencil atau pemberian modal usaha mikro.

Untuk menciptakan kebijakan pengentasan kemiskinan yang lebih inklusif dan berkelanjutan, beberapa langkah strategis dapat diambil:

1. Penguatan Sinergi antara Demokrasi Sosial dan Ekonomi Islam: Integrasi antara program sosial berbasis negara dan instrumen keuangan syariah, seperti zakat dan wakaf produktif.
2. Reformasi Birokrasi: Peningkatan transparansi dan akuntabilitas melalui sistem data terpadu berbasis teknologi.
3. Diversifikasi Sumber Pendanaan: Pengoptimalan penerimaan pajak progresif dan peran filantropi Islam untuk mendukung keberlanjutan fiskal.
4. Pembangunan Infrastruktur Sosial: Pemanfaatan wakaf untuk membangun fasilitas kesehatan dan pendidikan di daerah tertinggal.

Dengan mengintegrasikan nilai-nilai Ekonomi Islam ke dalam paradigma demokrasi sosial, kebijakan pengentasan kemiskinan di Indonesia dapat menjadi lebih inklusif dan berkeadilan, sekaligus memastikan bahwa hasil pembangunan dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat secara merata. Pendekatan ini tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperkuat kesejahteraan sosial yang berkelanjutan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Sen, A. (2020). *Development as Freedom*. Oxford University Press.
- Sen, A. (2020). *Development as Freedom*. Oxford University Press.
- Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). (2021). *Laporan Tahunan BAZNAS 2021: Potensi Zakat Nasional*. Jakarta: BAZNAS.
- Badan Pusat Statistik (BPS). (2022). *Indeks Kemiskinan dan Ketimpangan Sosial Indonesia*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik (BPS). (2023). *Statistik Kesejahteraan Sosial dan Dampaknya terhadap Akses Kesehatan di Indonesia*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Bardach, E. (2012). *A Practical Guide for Policy Analysis: The Eightfold Path to More Effective Problem Solving*. CQ Press.
- Deacon, B. (2023). *Social Democracy and Social Welfare: From the Welfare State to Universal Basic Income*. Cambridge University Press.
- Esping-Andersen, G. (2021). *The Three Worlds of Welfare Capitalism*. Princeton University Press.
- Harvey, D. (2022). *A Brief History of Neoliberalism*. Oxford University Press.
- Hidayat, A. (2019). Kebijakan Ekonomi Neoliberal dan Implikasinya terhadap Ketimpangan Sosial di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan*, 16(2), 134-145.
- Hukum, F. (2020). *Kesenjangan Infrastruktur Kesehatan di Indonesia: Analisis Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)*. Malang: Universitas Malang Press.
- Kementerian Sosial Republik Indonesia. (2020). *Laporan Capaian Program Keluarga Harapan (PKH) 2020*. Jakarta: Kementerian Sosial Republik Indonesia.
- Kementerian Sosial Republik Indonesia. (2022). *Laporan Pengelolaan Bantuan Sosial selama Pandemi COVID-19*. Jakarta: Kementerian Sosial Republik Indonesia.
- Lembaga Demografi Universitas Indonesia. (2022). *Korupsi dalam Distribusi Bantuan Sosial: Sebuah Laporan Tahunan*. Jakarta: Lembaga Demografi Universitas Indonesia.
- Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. (1985). *Naturalistic Inquiry*. Sage Publications.
- Mansur, H. (2018). Perbandingan Paradigma Neoliberal dan Demokrasi Sosial dalam Kebijakan Pengentasan Kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Kebijakan Sosial*, 12(1), 22-37.
- Mubyarto, S. (2019). *Dampak Kebijakan Neoliberal terhadap Ketimpangan Sosial dan Kemiskinan di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Perkasa, D. (2021). *Paradigma Demokrasi Sosial dalam Pembangunan Ekonomi Indonesia*. Surabaya: Pustaka Belajar.

- Piketty, T. (2020). *Capital and Ideology*. Harvard University Press.
- Prasetyo, R. (2022). *Evaluasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Mengurangi Kemiskinan di Indonesia*. Jakarta: Kementerian Sosial Republik Indonesia.
- Rachmawati, S. (2023). *Neoliberalism and Social Inequality in Indonesia: A Critical Review*. Bandung: Alfabeta.
- Robinson, W. I. (2020). *Neoliberalism and Its Impact on Poverty in Developing Countries*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Stiglitz, J. E. (2021). *The Price of Inequality: How Today's Divided Society Endangers Our Future*. W.W. Norton & Company.
- World Bank. (2019). *Indonesia: Energy Sector Reform and the Impact on Poverty*. World Bank.
- World Bank. (2021). *The Role of Conditional Cash Transfers in Indonesia's Poverty*.
- Mansur, A. (2018). *Tantangan Anggaran dalam Implementasi Kebijakan Sosial di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.